

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Semarang

Halaman 23

Dana Rp 8 Miliar untuk Tangani Kawasan Kumuh

UNGERAN- Pemerintah pusat pada 2019, mengalokasikan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) sebesar Rp 8 miliar untuk enam lokasi yang masuk dalam kawasan kumuh di Kabupaten Semarang.

Enam lokasi itu terdiri atas empat kawasan kumuh di Kecamatan Ungaran Timur, meliputi Desa Kawengen yang mendapat dana BPM Rp 1 miliar, Mluweh (Rp 1 miliar), Kalikayen (Rp 1 miliar), dan Kelurahan Gedanganak (Rp 1,5 miliar).

Selanjutnya dua lokasi di Kecamatan Ambarawa meliputi Kelurahan Tambakboyo yang mendapat dana bantuan Rp 1,5 miliar, dan Kupang Rp 2 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala DPU Kabupaten Semarang Totit

Octoriyanto melalui Pejabat Pembuat Komitmen, Faizul Muna dalam peresmian hasil kegiatan Bantuan Dana Infrastruktur (BDI) 2018 di Desa Kalikayen, Ungaran Timur, Senin (2/4).

Indikator kumuh yang ditangani meliputi keteraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, persampahan, dan pemadam kebakaran. Hadir dalam peresmian tersebut Bupati Semarang Mundjirin, Kepala DPU Totit Octoriyanto, camat, tokoh masyarakat, BKM, dan petugas pendamping Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

"Target kawasan kumuh yang akan diselesaikan adalah 129,97 hektare. Target ini diselesaikan secara kolaboratif dengan pemerintah desa dan kelurahan melalui dana desa dan dana kelurahan serta dana APBD

Kabupaten Semarang," kata Pejabat Pembuat Komitmen, Faizul Muna.

Dijelaskan, upaya Pemkab mencapai target RPJMD 2019 di bidang penanganan kumuh dilakukan serius. Mulai dari verifikasi SK No 050/0522/2014 yaitu aspek dan kriteria sesuai Permen PUPR 2/2016.

"Luas kumuh secara keseluruhan 477,92 hektare di 15 desa/kelurahan di 5 kecamatan. Adapun yang secara khusus didampingi Program Kotaku tersebar di enam desa/kelurahan tersebut," paparnya.

Kolaborasi

Asisten Korkot Bidang Ekonomi Program Kotaku, Eko Widhiyanto mengatakan,

Program Kotaku (dulu bernama PNPM Perkotaan-Red) kolaborasi antara semua pihak yang peduli penanganan kumuh. "OPD, swasta,

dan perguruan tinggi berada di bawah nakhoda Pemda. Kami juga berharap bisa menggandeng Bank Jateng dalam pencairan dana dan bantuan CSR untuk penanganan kumuh," tegas Eko Widhiyanto.

Sebelumnya, pada 2018 dukungan dana pusat Rp 5,6 miliar untuk Kalikayen, Kawengen, dan Mluweh. Luasan kumuh yang ditangani 40,37 hektare. Pada 2017, penanganan dimulai dengan dukungan dana pusat Rp 1,650 miliar untuk Kalikayen, Gedanganak, dan Tambakboyo dengan luasan kumuh yang tertangani 8,7 hektare. "Kegiatan 2019 sama dengan BDI, yakni penanganan drainase jalan, penyediaan alat pemadam kebakaran, dan motor sampah. Pada 2018 dihasilkan swadaya masyarakat Rp 373,9 juta," jelas Faizul Muna. (H14-22)